

FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH KOTA KOTAMOBAGU DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

Pra Sugiarto Hadi Yunus¹, Anderson G. Kumenanug², Ita Pingkan F. Rorong³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email : atoxp0745@gmail.com, andersongkumenaung@unsrat.ac.id, itarorong@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kotamobagu Menggunakan data sekunder berupa realisasi pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta data Kemandirian Fiskal Kota Kotamobagu periode tahun 2018-2021. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda time series.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB_P2, BPHTB secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan diperoleh bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB-P2, BPHTB dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Kata kunci : Kemandirian Fiskal Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence regional fiscal independence. This research was conducted in the City of Kotamobagu Using secondary data in the form of realization of income from Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertising Tax, Rural and Urban Land and Building Tax and Fees for Acquisition of Land and Building Rights as well as Kotamobagu City Fiscal Independence data for the period 2018-2021. The analytical method used is multiple time series regression.

Based on the results of the study, it was found that Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertising Tax, PBB_P2, BPHTB jointly had a significant influence on Local Own Revenue and it was obtained that Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertisement Tax, PBB-P2, BPHTB and Local Own Revenue collectively have a significant influence on Regional Fiscal Independence.

Keywords: Regional Fiscal Independence, Regional Original Revenue, Tax.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensi yang dimiliki melalui kreativitas masyarakat dan menikmati hasil dari potensi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Selain itu dengan adanya otonomi daerah, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat berkurang, pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dengan mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Kustianingsih, dkk., 2018).

Namun demikian, meskipun telah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerah sendiri, nyatanya masih terdapat beberapa daerah yang belum bisa dikatakan sebagai daerah yang mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang merupakan gambaran kemampuan masing-masing daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah (PMK No. 120, 2020). Indeks Kapasitas Fiskal selalu mengalami perubahan setiap tahunnya sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah.

Tabel 1
Total Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kota Kotamobagu
Tahun 2018-2021

Tahun	Indeks KFD	Kategori KFD
2018	0,39	Sangat Rendah
2019	0,36	Sangat Rendah
2020	0,44	Sangat Rendah
2021	0,51	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 indeks Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kota Kotamobagu berada pada angka 0,39, pada tahun 2019 berada pada angka 0,36, tahun 2020 sebesar 0,44, dan pada tahun 2021 adalah sebesar 0,51. Meskipun Indeks Kapasitas Fiskal Daerah periode 2018 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan sehingga kategori Indeks Kapasitas Daerah (KFD) masih berada pada kategori Sangat Rendah selama 4 tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Kotamobagu belum dapat dikatakan sebagai Kota dengan Kota yang mandiri.

Terdapat beberapa indikator dalam mengukur kemampuan finansial Pemerintah Daerah, salah satunya adalah dengan mengukur tingkat kemandirian keuangannya (Mbipi, dkk., 2020). Tingkat kemandirian adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya (Orocomna, dkk., 2017). Lestari, dkk. (2016) mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan suatu daerah, Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 33, 2004).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pajak daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah, diantaranya Prasetyo dan Rahayu (2019), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) baik secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, penilitan juga dilakukan oleh Bella, dkk. (2022) yang mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan belanja modal secara parsial dan secara simultan berpengaruh positif terhadap variabel kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sumatera Barat. Lebih lanjut lagi, hasil penelitian yang dilakukan oleh Bukit (2022) menyatakan bahwa Pendapatan Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) melalui kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2019.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan masih banyaknya daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang belum dapat mencapai indeks Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) dengan kategori Sangat Tinggi, menggambarkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia belum dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri yang menyebabkan daerah tersebut masih sangat bergantung terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat kemandirian fiskal daerah. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini menggabungkan tujuh variabel dalam satu kerangka penelitian, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai variabel independen, kemandirian fiskal daerah sebagai variabel dependen serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel *intervening*.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah?
2. Apakah secara parsial Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB-P2 dan BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Apakah secara parsial pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB-P2 dan BPHTB secara langsung berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah
2. Untuk mengetahui apakah secara parsial Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB-P2 dan BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Untuk mengetahui apakah secara parsial Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB-P2 dan BPHTB secara langsung berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Teoritis
Penelitian ini memberikan manfaat secara teori mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal daerah, serta manfaat teori mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian fiskal daerah.
2. Praktis
Penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi instansi pemerintah daerah sebagai objek penelitian untuk menilai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah, sehingga dapat membantu instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Tinjauan Pustaka Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Lebih lanjut lagi, dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global, untuk itu pemerintah diberikan hak dan kewenangan atas daerahnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi dilakukan dengan pelaksanaan penataan daerah yang ditunjukan dengan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah (UU No. 23 Tahun 2014).

Kemandirian Fiskal Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam melaksanakan otonominya, keuangan daerah merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah (Sumardjoko, 2019). Kemampuan daerah yang

dimaksud adalah seberapa jauh kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangannya sendiri guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat daerah tanpa harus bergantung kepada bantuan-bantuan dari pemerintah pusat (Rante, dkk., 2017).

Pendapatan Asli Daerah

Jejen (2022) mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah keuangan daerah yang diperoleh dari potensi dan sumber daya yang digali dan dikelola di wilayah daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 1 (2022)).

Baharuddin (2022) berpendapat bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berupaya memberdayakan sektor swasta untuk membiayai kegiatan pembangunan secara optimal. Upaya-upaya peningkatan PAD ini tidak lepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar kepala daerah dengan dewan perwakilan daerah. Potensi-potensi yang dimiliki masing-masing daerah yang telah dikelola dengan baik diharapkan dapat meningkatkan sumber keuangan dari pendapatan asli daerah. Jika sumber keuangan dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik maka dapat memberikan cerminan kinerja dari pemerintah daerah (Taras dan Artini, 2017).

Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontrobusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU No. 28, 2009) .

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel
- b. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran
- c. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan
- d. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
- e. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang terkait dengan Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Fiskal Daerah.

Kasih dan Sulistyowati (2022) , membuktikan bahwa Pajak Daerah dan retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini dilaksanakan di

kota Surabaya dengan variable dependen adalah Pendapatan Asli Daerah dan Variabel independent adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini menggunakan Data Sekunder dari Laporan realisasi Pendapatan dengan alat analisis Regresi Linear Berganda.

Ginting, dkk. (2019) dengan judul Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan menggunakan data kluster Kabupate/Kota dari kluster I sampai dengan IV pada tahun 2013-2018 dengan metode analisis regresi panel data model menyatakan bahwa Variabel dana perimbangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada Kabupaten/Kota di Kluster I, III, dan IV terhadap kemandirian keuangan daerah serta Variabel dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Musfirati dan Sugiyanto (2021), dengan menggunakan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan dana keistimewaan membuktikan bahwa Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan keistimewaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan sampel seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan analisis Regresi Linear Berganda. Penelitian ini berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Sauyai, dkk. (2022) , dengan judul penelitian Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong Tahun 2014 – 2019, memperoleh hasil penelitian bahwa Tingkat efektivitas pajak daerah Kota Sorong berada pada kriteria sangat efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 109,77 persen; Tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Sorong berada pada kriteria kurang efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 60,88 persen; Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong dinilai cukup baik dengan rata-rata kontribusi sebesar 30,68 persen; dan Kontribusi dRetribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong dinilai kurang dengan rata-rata kontribusi sebesar 15,75 persen. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis efektivitas dan kontribusi dengan menggunakan data sekunder berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Ramadhan (2019), dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara membuktikan bahwa Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Sumatera Utara. Data yang digunakan adalah Laporan Keuangan Audited pada 33 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Dengan analisis regresi linear berganda, penelitian ini menggunakan variable dependen Pendapatan Asli daerah serta variable independent Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Bella, dkk. (2022), dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran pada 78 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Baran dengan analisis regresi model data panel menemukan bahwa Variabel PAD dan belanja modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota se Sumatera Barat; Variabel DAU secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota se Sumatera Barat; dan Variabel PAD, DAU dan belanja modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota se Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan tingkat kemandirian keuangan sebagai variable dependen dan Variabel Independennya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana alokasi umum serta Belanja modal.

Iqbal dan Sunardika (2018) , dengan judul penelitian Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung dengan variable dependen Pendapatan Asli Daerah dan variable independent Pajak dan retribusi Daerah menemukan bahwa Secara parsial pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD; Secara parsial retribusi daerah tidak terdapat pengaruh yang signifikan dengan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak dan retribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Bandung.

Mulyana dan Budianingsih (2019), membuktikan bahwa Secara simultan pajak hotel dan pajak restoran terdapat pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta Secara

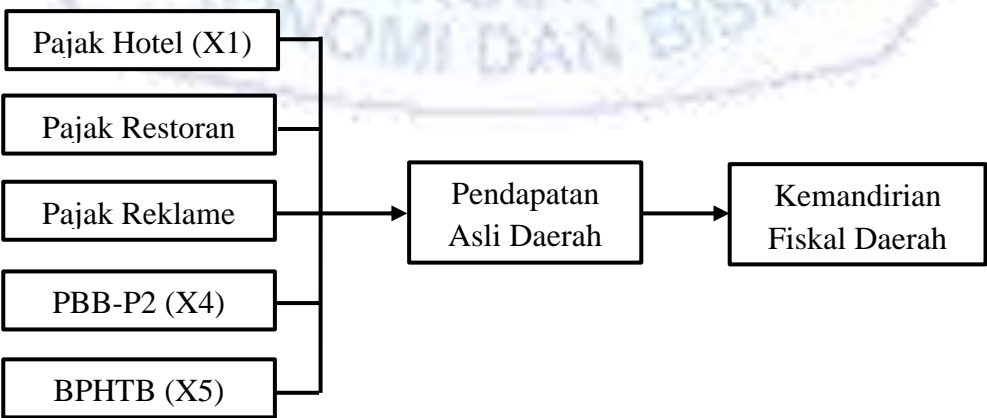
parsial pajak hotel dan pajak restoran terdapat pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini merupakan hasil penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variable dependen, Pajak hotel dan pajak restoran sebagai variable independent dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

Biringkanae dan Tammu (2021), melalui penelitian berjudul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja menggunakan metode kuantitatif dan alat analisis regresi linear berganda membuktikan bahwa Secara parsial pajak hotel dan pajak hiburan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Secara simultan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Samosir (2020) , menggunakan pendapatan asli daerah sebagai variable dependen dengan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sebagai variable independent, menemukan bahwa Hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran dikategorikan kurang mempunyai kontribusi, sedangkan pajak hiburan dikategorikan relatif tidak mempunyai kontribusi; Hasil analisis efektivitas dapat menggambarkan kemampuan Pemda Kabupaten Sikka dalam merealisasikan pajak hotel dan restoran, sedangkan pajak hiburan menunjukkan ketidakmampuan Pemda Kabupaten Sikka dalam merealisasikan pajak hiburan; Secara simultan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan Secara parsial pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan analisis kontribusi dan efektivitas uji f dan uji t.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih banyak digunakan sebagai variabel independen ataupun variabel dependen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum pernah digunakan sebagai variabel *intervening*. Selain itu, belum terdapat penelitian yang menggunakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea hak atas perolehan tanah dan bangunan sebagai variabel independen. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tujuh variabel sekaligus yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai variabel independen kemudain Pendapatan Asli Daerh (PAD) sebagai variabel *intervening*, dan kemandirian fiskal daerah sebagai variabel dependen. Pada tahap pertama pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan akan diuji apakah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan diuji apakah berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah.

Kerangka Berpikir



Berdasarkan gambar di atas, penelitian ini akan menguji pengaruh dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan selanjutnya akan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian fiskal daerah.

Pengembangan Hipotesis

H₁ : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah

H₂ : Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

H₃ : Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

H₄ : pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

H₅ : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

H₆ : BPHTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada penafsiran angka-angka statistik dimana tujuan akhirnya adalah menguji teori, menguji pengaruh dan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik dan kemudian meramalkan hasilnya (Siregar, 2019).

Data dan Sumber Data

Objek penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2018 sampai dengan 2021.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk *time series* dimana data yang digunakan adalah data keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018 sampai dengan 2021 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional atas variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pajak Hotel (X1) sebagai variabel independen adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dengan satuan yang digunakan adalah Rupiah (Rp);
2. Pajak Restoran (X2) sebagai variabel independen adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, dengan satuan Rupiah (Rp);
3. Pajak Reklame (X3) sebagai variabel independen adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, dengan satuan yang digunakan adalah Rupiah (Rp);
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di singkat PBB-P2 (X4) sebagai variabel independen adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dengan satuan Rupiah (Rp);
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di singkat BPHTB (X5) sebagai variabel independen adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan satuan Rupiah (Rp);
6. Pendapatan Asli Daerah disingkat PAD sebagai variable intervening (Z) adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan satuan Rupiah (Rp); dan
7. Kemandirian Fiskal Daerah sebagai variable dependen adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperoleh daerah, dengan satuan Indeks.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisa Data adalah tahap yang tidak boleh dihindari dan wajib untuk diselesaikan dengan baik. Pada tahap ini kalian akan menentukan teknik analisis apa yang akan

kalian gunakan untuk mengolah data yang sudah kalian dapatkan dari lapangan. Biasanya pada tahap ini peneliti mulai mencari beberapa sumber referensi agar mereka tidak salah pilih. Hal tersebut sangatlah wajar karena hasil dari pengolahan data mereka akan menentukan kesimpulan yang akan mereka ambil atau menentukan kebenaran dari teori yang sedang mereka buktikan.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik untuk memastikan persamaan regresi yang difungsikan tepat dan valid. Sebelum melakukan analisa regresi berganda dan pengujian hipotesis, maka harus melakukan beberapa uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan sudah terbebas dari penyimpangan asumsi dan memenuhi ketentuan untuk mendoatkan linier yang baik. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera (J-B) Basuki dan Prawoto (2016) .

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Model regresi dinyatakan bebas multikolinieritas apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau $VIF \geq 0,10$ (Ghozali, 2018) .

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah objek yang diteliti mempunyai varian yang berbeda. Jika *variance* dari residual satu pengalaman ke pengalaman lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas (Ghozali, 2018) .

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah hubunngan antara anggota seri dari observasi-observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (data time series) atau tempat (data cross section) (Gujarati, 2013) . Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Metode Analisis

Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis dimana data sekunder yang diperoleh diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Metode metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu metode pengolahan data dengan menggunakan teknik statistic, yang terdiri dari:

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018) . Regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel indpenden dan variabel *intervening* yang terdiri pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian fiskal daerah sebagai variabel dependen. Sehingga dapar dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta1.X1 + \beta2.X2 + \beta3.X3 + \beta4.X4 + \beta5.X5 + e$$

Keterangan:

Y	Kemandirian fiskal daerah	X1	Pajak Hotel
α	Konstanta	X2	Pajak Restoran

β	Koefisien Regresi	X3	Pajak Reklame
Z	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	X4	PBB-P2
e	Error terms	X5	BPHTB

Uji t

Menurut (Ghozali, 2018) , uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Kriteria uji statistik t adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 ($\leq 0,05$) maka hipotesis diterima.
- b. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($> 0,05$) maka hipotesis ditolak.

Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05% (Ghozali, 2018). Kriteria uji F adalah jika tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil pengujian lebih kecil dari 0,05 ($< 0,05$), maka variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah angka yang menyatakan atau digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen (Siregar, 2019). Koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur kekuatan model penelitian dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel amat terbatas. Sedangkan, nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberika semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan

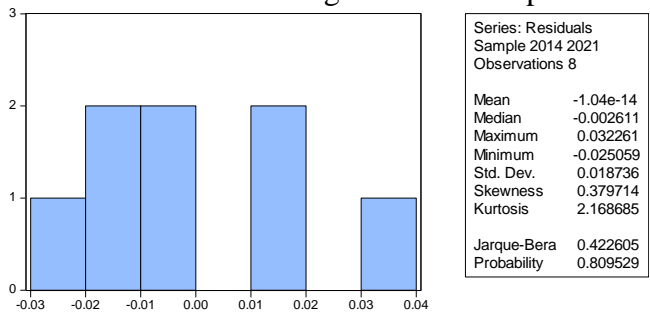
Untuk mendapatkan hasil regresi antar variabel independen dengan variabel dependen maka digunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu periode 2018 sampai dengan 2021. Data sekunder tersebut diestimasi dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) analisis regresi berganda dan diolah menggunakan program *Eviews 8.0*.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera (J-B).

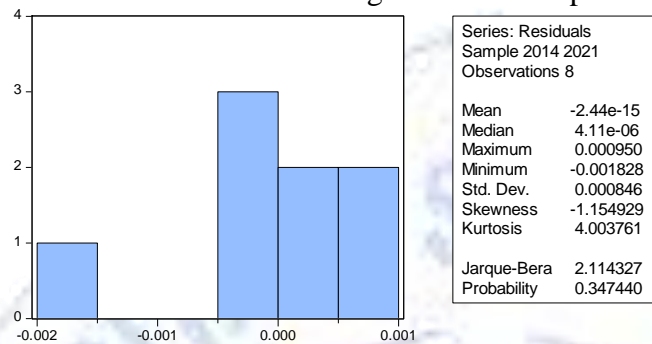
Tabel 2
Hasil Uji Normalitas dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen



Hasil Olah Eviews 8.0

Hasil yang diperoleh dari uji normalitas dengan nilai Jarque-Bera (J-B) adalah nilai probabilitas sebesar $0,809529 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas dengan Kemandirian Fiskal Daerah
sebagai Variabel Dependen



Hasil Olah Eviews 8.0

Hasil yang diperoleh dari uji normalitas dengan nilai Jarque-Bera (J-B) adalah nilai probabilitas sebesar $0,34744 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan besarnya *tolerance value* dan besarnya *variance inflating factor* (VIF). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah nilai *tolerance* haruslah $\geq 0,10$ dan nilai VIF haruslah ≤ 10 .

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas dengan Pendapatan Asli Daerahb
sebagai Variabel Dependen

Variance Inflation Factors			
Date: 12/30/22 Time: 12:25			
Sample: 2014 2021			
Included observations: 8			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	15.37857	10013.9	NA
PH_X1	0.145429	76629.69	1.379600
PRS_X2	0.372286	206012.6	1.852059
PRK_X3	0.510448	256926.1	3.793352
PBB_P2_X4	0.155166	92586.23	1.950472
BPHTB_X5	0.023647	12980.06	1.103714

Hasil Olah Eviews 8.0

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4 diatas enunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$, dan nilai VIF ≤ 10 . Kriteria tersebut telah terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas dengan Kemandirian Fiskal
sebagai Variabel Dependen

Variance Inflation Factors
Date: 12/30/22 Time: 17:23
Sample: 2014 2021
Included observations: 8

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.369782	590121.5	NA
PH_X1	0.001060	136831.0	2.463432
PRS_X2	0.012008	1628553.	1.464074
PRK_X3	0.004710	581065.7	8.579070
PBB_P2_X4	0.003612	528211.2	1.112758
BPHTB_X5	0.000106	14281.25	1.214356
PAD_Y1	0.002040	373777.7	1.138377

Hasil Olah Eviews 8.0

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$, dan nilai *VIF* ≤ 10 . Kriteria tersebut telah terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi dengan Kemandirian Fiskal sebagai variabel dependen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji gletser, dengan cara meregresikan semua variabel independen dengan nilai absolut residual (*abs*) sebagai variabel dependennya. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Pendapatan Asli Daerah
sebagai Variabel Dependen

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.384439	Prob. F(5,2)	0.4698
Obs*R-squared	6.206719	Prob. Chi-Square(5)	0.2866
Scaled explained SS	1.271802	Prob. Chi-Square(5)	0.9378

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Date: 12/30/22 Time: 13:18
Sample: 2014 2021
Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.572391	1.013273	0.564893	0.6291
PH_X1	0.155390	0.098536	1.576998	0.2555
PRS_X2	-0.172761	0.157655	-1.095821	0.3875
PRK_X3	-0.120588	0.184605	-0.653223	0.5807
PBB_P2_X4	0.035188	0.101781	0.345722	0.7625
BPHTB_X5	0.039279	0.039734	0.988540	0.4271

Hasil Olah Eviews 8.0

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari seluruh variabel independent yang digunakan secara berurutan yaitu 0.2555; 0.3875; 0.5807; 0.7625 dan 0.4271 yang artinya $> 0,05$. Hasil yang demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen.

Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Kemandirian Fiskal Daerah
sebagai Variabel Dependen

Heteroskedasticity Test: Glejser			
F-statistic	0.813923	Prob. F(6,1)	0.6899
Obs*R-squared	6.640274	Prob. Chi-Square(6)	0.3554
Scaled explained SS	1.497711	Prob. Chi-Square(6)	0.9596

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Date: 12/30/22 Time: 17:40
Sample: 2014 2021
Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.013193	0.203002	-0.064990	0.9587
PH_X1	-0.004085	0.010866	-0.375944	0.7711
PRS_X2	0.005275	0.036581	0.144208	0.9088
PRK_X3	0.008214	0.022911	0.358526	0.7808
PBB_P2_X4	-0.003031	0.020063	-0.151059	0.9046
BPHTB_X5	-0.002452	0.003440	-0.712844	0.6057
PAD_Y1	-0.001767	0.015078	-0.117191	0.9257

Hasil OlahEviews 8.0

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari seluruh variabel independen yang digunakan secara berurutan yaitu 0.7711; 0.9088; 0.7808; 0.9046; 0.6057 dan 0.9257 yang artinya $> 0,05$. Hasil yang demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas dengan Kemandirian Fiskal Daerah sebagai variabel dependen.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah hubungan antara anggota seri dari observasi-observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (data time series) atau tempat (data cross section) (Gujarati, 2013). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji Breusch Godfrey atau disebut dengan Lagrange Multiplier. Apabila nilai probabilitas $> \alpha = 5\%$ berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya nilai probabilitas $< \alpha = 5\%$ berarti terjadi autokorelasi.

Tabel 8
Hasil Uji Autokorelasi dengan Pendapatan Asli Daerah
sebagai Variabel Dependen

Dependent Variable: PAD_Y1
Method: Least Squares
Date: 12/30/22 Time: 13:25
Sample: 2014 2021
Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12.26803	3.921552	-3.128361	0.0888
PH_X1	0.478018	0.381351	1.253486	0.3367
PRS_X2	2.267457	0.610153	3.716212	0.0654
PRK_X3	1.134887	0.714456	1.588463	0.2531
PBB_P2_X4	-1.208360	0.393911	-3.067596	0.0919
BPHTB_X5	-0.068856	0.153777	-0.447761	0.6982
R-squared	0.991216	Mean dependent var		10.71329
Adjusted R-squared	0.969254	S.D. dependent var		0.199904
S.E. of regression	0.035052	Akaike info criterion		-3.750265
Sum squared resid	0.002457	Schwarz criterion		-3.690684
Log likelihood	21.00106	Hannan-Quinn criter.		-4.152116
F-statistic	45.13508	Durbin-Watson stat		1.714159
Prob(F-statistic)	0.021817			

Hasil Olah Eviews 8.0

Hasil uji autokorelasi dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen menggunakan uji Durbin Waston (DW). Model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi baik positif maupun negatif, jika nilai $-2 < DW < 2$, maka Pendapatan asli daerah sebagai Variabel Dependen terbebas uji autokolerasi.

Tabel 9
Hasil Uji Autokorelasi dengan Kemandirian Fiskal Daerah
sebagai Variabel Dependen

Dependent Variable: KFD_Y2
Method: Least Squares
Date: 12/30/22 Time: 17:50
Sample: 2014 2021
Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.683537	0.608097	6.057480	0.1042
PH_X1	-2.407933	0.032550	-73.97600	0.0086
PRS_X2	-0.383957	0.109579	-3.503922	0.1770
PRK_X3	2.632722	0.068631	38.36063	0.0166
PBB_P2_X4	0.059439	0.060099	0.989019	0.5035
BPHTB_X5	-0.860252	0.010303	-83.49373	0.0076
PAD_Y1	0.510757	0.045167	11.30821	0.0562
R-squared	0.999984	Mean dependent var		-0.223946
Adjusted R-squared	0.999890	S.D. dependent var		0.213259
S.E. of regression	0.002239	Akaike info criterion		-9.695047
Sum squared resid	5.01E-06	Schwarz criterion		-9.625536
Log likelihood	45.78019	Hannan-Quinn criter.		-10.16387
F-statistic	10584.22	Durbin-Watson stat		1.182436
Prob(F-statistic)	0.007440			

Hasil Olah Eviews 8.0

Hasil uji autokorelasi dengan Kemandirian Fiskal Daerah sebagai Variabel Dependen menggunakan uji durbin waston (DW). Model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi baik positif maupun negatif, jika nilai $-2 < DW < 2$, maka Kemandirian Fiskal Daerah sebagai Variabel Dependen terbebas uji autokolerasi

Hasil Analisis Regresi

Untuk mendapatkan hasil regresi antar variabel independen dengan variabel dependen maka digunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode 2014 sampai dengan 2021. Data sekunder tersebut diestimasi dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) analisis regresi berganda sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan diolah menggunakan program *Eviews 8.0*.

Persamaan Regresi

Hasil analisis jalur dengan menggunakan *Eviews 8.0* melalui dua tahap persamaan regresi. Persamaan yang pertama dalam analisis jalur yaitu pengaruh Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4) dan BPHTB (X5) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana dirumuskan dalam persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \beta_4.X_4 + \beta_5.X_5 + e_1$$
$$PAD = C + PH.X_1 + PRS.X_2 + PRK.X_3 + PBB.X_4 + BPHTB.X_5 + e_1$$

Tabel 10
Hasil Uji Regresi Linear Berganda dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen

Dependent Variable: PAD_Y1
Method: Least Squares
Date: 12/30/22 Time: 12:19
Sample: 2014 2021
Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12.26803	3.921552	-3.128361	0.0888
PH_X1	0.478018	0.381351	1.253486	0.3367
PRS_X2	2.267457	0.610153	3.716212	0.0654
PRK_X3	1.134887	0.714456	1.588463	0.2531
PBB_P2_X4	-1.208360	0.393911	-3.067596	0.0919
BPHTB_X5	-0.068856	0.153777	-0.447761	0.6982
R-squared	0.991216	Mean dependent var	10.71329	
Adjusted R-squared	0.969254	S.D. dependent var	0.199904	
S.E. of regression	0.035052	Akaike info criterion	-3.750265	
Sum squared resid	0.002457	Schwarz criterion	-3.690684	
Log likelihood	21.00106	Hannan-Quinn criter.	-4.152116	
F-statistic	45.13508	Durbin-Watson stat	1.714159	
Prob(F-statistic)	0.021817			

Hasil Olah Eviews 8.0

Persamaan regresi yang diperoleh berdasarkan Tabel 10 adalah :
 $PAD_Y1 = C + PH_X1 + PRS_X2 + PRK_X3 + PBBP2_X4 + BPHTB_X5 + e_1$

$$PAD_Y1 = - 12,26803 + ,4780 PH + 2,2675 PRS + 1,1349 PRK - 1,2084 PBBP2$$
$$-0.0689 BPHTB + e_1$$

Nilai $e_1 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0.991} = \sqrt{0,009} = 0,095$

Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:
 $PAD = - 12,26803 + 0,4780 PH + 2,2675 PRS + 1,1349 PRK - 1,2084 PBBP2$
 $-0.0689 BPHTB + 0,095$

Berdasarkan hasil persamaan regresi analisis jalur pada tabel *coefficients* di atas menunjukkan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar - 12,26803 menunjukkan bahwa apabila variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4) dan BPHTB (X5) nilainya 0 (nol), maka nilai Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar - 12,26803.

- Koefisien regresi Pajak Hotel (X1) sebesar 0,4780 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel Pajak Hotel sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,4780 dengan catatan variabel lain tetap.
- Koefisien regresi Pajak Restoran (X2) sebesar 2,2675 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel Pajak Restoran sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,2675 dengan catatan variabel lain tetap.
- Koefisien regresi Pajak Reklame (X3) sebesar 1,1349 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel Pajak Reklame sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,1349 dengan catatan variabel lain tetap.
- Koefisien regresi PBBP2 (X4) sebesar -1,2084 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel PBBP2 sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -1,2084 dengan catatan variabel lain tetap.
- Koefisien regresi BPHTB (X5) sebesar -0.0689 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel PBBP2 sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -0.0689 dengan catatan variabel lain tetap.
- Nilai residual (*error*) variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4) dan BPHTB (X5) terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,095 atau 9,5 %. Nilai tersebut merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Persamaan regresi kedua dalam analisis jalur ini adalah Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4), BPHTB (X5), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kemandirian fiskal daerah (KFD). Persamaan regresi ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta1.X1 + \beta2.X2 + \beta3.X3 + \beta4.X4 + \beta5.X5 + \beta6.Z + e2$$
$$KFD = C + PH.X1 + PRS.X2 + PRK.X3 + PBB.X4 + BPHTB.X5 + PAD.Z + e2$$

Tabel 11
Hasil Uji Regresi Linear Berganda dengan Kemandirian Fiskal Daerah sebagai Variabel Dependen

Dependent Variable: KFD_Y2
Method: Least Squares
Date: 12/30/22 Time: 18:00
Sample: 2014 2021
Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.683537	0.608097	6.057480	0.1042
PH_X1	-2.407933	0.032550	-73.97600	0.0086
PRS_X2	-0.383957	0.109579	-3.503922	0.1770
PRK_X3	2.632722	0.068631	38.36063	0.0166
PBB_P2_X4	0.059439	0.060099	0.989019	0.5035
BPHTB_X5	-0.860252	0.010303	-83.49373	0.0076
PAD_Y1	0.510757	0.045167	11.30821	0.0562
R-squared	0.999984	Mean dependent var	-0.223946	
Adjusted R-squared	0.999890	S.D. dependent var	0.213259	
S.E. of regression	0.002239	Akaike info criterion	-9.695047	
Sum squared resid	5.01E-06	Schwarz criterion	-9.625536	
Log likelihood	45.78019	Hannan-Quinn criter.	-10.16387	
F-statistic	10584.22	Durbin-Watson stat	1.182436	
Prob(F-statistic)	0.007440			

Hasil Olah Eviews 8.0

Persamaan regresi yang diperoleh berdasarkan Tabel 11 adalah:

$$KFD_Y2 = C + PH_X1 + PRS_X2 + PRK_X3 + PBB_P2_X4 + BPHTB_X5 + PAD_Z + e2$$

$$KFD = 3.6835 - 2.4079 PH - 0.3839 PRS + 2.6327 PRK + 0.0594 PBB_P2 - 0.8603 BPHTB + 0.5108 PAD + e2$$

$$\text{Nilai } e2 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0.999} = \sqrt{0.001} = 0,032$$

Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$KFD = 3.6835 - 2.4079 PH - 0.3839 PRS + 2.6327 PRK + 0.0594 PBB_P2 - 0.8603 BPHTB + 0.5108 PAD + 0,032$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi analisis jalur pada tabel *coefficients* di atas menunjukkan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 3.6835 menunjukkan bahwa apabila variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4), BPHTB (X5), dan pendapatan asli daerah (PAD) nilainya 0 (nol), maka nilai Kemandirian Fiskal Daerah adalah sebesar 3.6835.
2. Koefisien regresi Pajak Hotel (X1) sebesar - 2.4079 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel Pajak Hotel sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Kemandirian Fiskal Daerah sebesar - 2.4079 dengan catatan variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi Pajak Restoran (X2) sebesar - 0.3839 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel Pajak Restoran sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Kemandirian Fiskal Daerah sebesar - 0.3839 dengan catatan variabel lain tetap.
4. Koefisien regresi Pajak Reklame (X3) sebesar 2.6327 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel Pajak Reklame sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Kemandirian Fiskal Daerah sebesar 2.6327 dengan catatan variabel lain tetap.
5. Koefisien regresi PBB_P2 (X4) sebesar 0.0594 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel PBB_P2 sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Kemandirian Fiskal Daerah sebesar 0.0594 dengan catatan variabel lain tetap.
6. Koefisien regresi BPHTB (X5) sebesar - 0.8603 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel BPHTB sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Kemandirian Fiskal Daerah sebesar - 0.8603 dengan catatan variabel lain tetap.
7. Koefisien regresi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0.5108 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel pendapatan asli daerah (PAD) sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan Kemandirian Fiskal Daerah sebesar 0.5108 dengan catatan variabel lain tetap.
8. Nilai residual (*error*) variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4), BPHTB (X5), dan
9. pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Kemandirian Fiskal Daerah (KFD) sebesar 0,032 atau 3,2 %. Nilai tersebut merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Tabel 12

Hasil Uji t dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen

Dependent Variable: PAD_Y1
Method: Least Squares
Date: 12/30/22 Time: 12:19
Sample: 2014 2021
Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12.26803	3.921552	-3.128361	0.0888
PH_X1	0.478018	0.381351	1.253486	0.3367
PRS_X2	2.267457	0.610153	3.716212	0.0654
PRK_X3	1.134887	0.714456	1.588463	0.2531
PBB_P2_X4	-1.208360	0.393911	-3.067596	0.0919
BPHTB_X5	-0.068856	0.153777	-0.447761	0.6982

Hasil Olah Eviews 8.0

Berdasarkan Tabel 12 hasil analisis statistik pada variabel Pajak Hotel diperoleh nilai $t_{statistik} = 1,253486$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ persen (%), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,9200. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($1,253486 < 2,9200$), berarti H1 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel Pajak Hotel secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Tabel hasil analisis statistik pada variabel Pajak Restoran diperoleh nilai $t_{statistik} = 3.716212$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ persen (%), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,9200. Nilai Absolut $t_{statistik} > t_{tabel}$ ($3.716212 > 2,9200$), berarti H2 diterima. Menunjukkan bahwa Variabel Pajak Restoran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Tabel hasil analisis statistik pada variabel Pajak Pajak Reklame diperoleh nilai $t_{statistik} = 1.588463$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ persen (%), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,9200. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($1.588463 < 2,9200$), berarti H3 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel Pajak Reklame secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Tabel hasil analisis statistik pada variabel PBB_P2 diperoleh nilai $t_{statistik} = -3.067596$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ %, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,9200. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($-3.067596 < 2,9200$), berarti H4 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel PBB_P2 secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Tabel hasil analisis statistik pada variabel BPHTB diperoleh nilai $t_{statistik} = -0.447761$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ %, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,9200. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($-0.447761 < 2,9200$), berarti H5 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel BPHTB secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD.

Tabel 13
Hasil Uji t dengan Kemandirian Fiskal Daerah
sebagai Variabel Dependen

Dependent Variable: KFD_Y2
Method: Least Squares
Date: 12/30/22 Time: 18:00
Sample: 2014 2021
Included observations: 8

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.683537	0.608097	6.057480	0.1042
PH_X1	-2.407933	0.032550	-73.97600	0.0086
PRS_X2	-0.383957	0.109579	-3.503922	0.1770
PRK_X3	2.632722	0.068631	38.36063	0.0166
PBB_P2_X4	0.059439	0.060099	0.989019	0.5035
BPHTB_X5	-0.860252	0.010303	-83.49373	0.0076
PAD_Y1	0.510757	0.045167	11.30821	0.0562

Hasil Olah Eviews 8.0

Berdasarkan Tabel 13 hasil analisis statistik pada variabel Pajak Hotel diperoleh nilai $t_{statistik} = -73.976$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05\%$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 6,3138. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($-73.976 < 6,3138$), berarti H1 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel Pajak Hotel secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Berdasarkan Tabel 13 hasil analisis statistik pada variabel Pajak Restoran diperoleh nilai $t_{statistik} = -3.503922$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05\%$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 6,3138. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($-3.503922 < 6,3138$), berarti H2 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel Pajak Restoran secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Berdasarkan Tabel hasil analisis statistik pada variabel Pajak Reklame diperoleh nilai $t_{statistik} = 38.36063$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05\%$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 6,3138. Nilai Absolut $t_{statistik} > t_{tabel}$ ($38.36063 > 6,3138$), berarti H3 diterima. Menunjukkan bahwa Variabel Pajak Reklame secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Berdasarkan Tabel 13 hasil analisis statistik pada variabel PBB_P2 diperoleh nilai $t_{statistik} = 0.989019$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05\%$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 6,3138. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($0.989019 < 6,3138$), berarti H4 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel PBB_P2 secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Berdasarkan Tabel 13 hasil analisis statistik pada variabel BPHTB diperoleh nilai $t_{statistik} = -83.49373$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05\%$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 6,3138. Nilai Absolut $t_{statistik} < t_{tabel}$ ($-83.49373 < 6,3138$), berarti H5 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel BPHTB secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Berdasarkan Tabel 13 hasil analisis statistik pada variabel Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai $t_{statistik} = 11.30821$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05\%$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 6,3138. Nilai Absolut $t_{statistik} > t_{tabel}$ ($11.30821 > 6,3138$), berarti H6 diterima. Menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 13 dapat dijelaskan pengaruh variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4), BPHTB (X5), secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Nilai F-statistik yang diperoleh 45.13508 sedangkan F-tabel 19.30. Nilai F table berdasarkan besarnya α 5% dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(k-1/6-1) = 5$ dan df untuk denominator $(n-k/8-6) = 2$. Dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel yang artinya bahwa variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2

(X4), BPHTB (X5) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel dapat dijelaskan pengaruh variabel Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4), BPHTB (X5) dan Pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Nilai F-statistik yang diperoleh 10584.22 sedangkan F-tabel 234. Nilai F table berdasarkan besarnya α 5% dan df dimana besarnya ditentukan oleh numerator $(k-1/7-1) = 6$ dan df untuk denominator $(n-k/8-7) = 1$. Dengan demikian F-statistik lebih besar dari F-tabel yang artinya bahwa Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4), BPHTB (X5) dan Pendapatan asli daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Koefisien Determinan (R^2)

Uji ini digunakan untuk melihat kemampuan model yang terdiri Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4), BPHTB (X5) dalam menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah. serta Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), Pajak Reklame (X3), PBB_P2 (X4), BPHTB (X5) dan Pendapatan Asli Daerah dalam menjelaskan variasi Kemandirian fiskal daerah. Apabila Koefisien Determinasi R^2 tinggi (mendekati angka 1 menunjukkan kemampuan model sangat baik. Sebaliknya apabila Koefisien Determinasi R^2 sangat rendah atau jauh dari angka 1 maka kemampuan R^2 dianggap rendah, dimana R^2 bergerak dari 0 hingga 1. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Kuncoro,2003;220).

Berdasarkan pengujian data dengan Eviews, maka diperoleh data besarnya R^2 atau koefisien determinasi adalah sebesar 0.991216. Hal tersebut berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 0.991216 dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Sedangkan pada data besarnya R^2 atau koefisien determinasi sebesar 0.999984. Hal tersebut berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 0.999984 dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian sebagaimana telah diungkapkan di atas telah memberikan bukti empiris bahwa model penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah baik dan dapat diterima. Demikian juga hasil pengujian hipotesis penelitian dalam penelitian ini telah diperoleh hasilnya secara keseluruhan. Berikut adalah pembahasan hasil penelitian dan temuan penelitian yang dapat diungkapkan dalam penelitian ini.

Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah

Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah. Pada hasil perhitungan statistika menunjukkan bahwa hasil analisis pada variabel Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai $t_{\text{statistik}} = 11.30821$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05\%$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 6,3138. Nilai Absolut $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$ ($11.30821 > 6,3138$), berarti H_0 diterima. Menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Hal ini berarti semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin besar pula tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Kotamobagu, begitu pula sebaliknya semakin kecil pendapatan asli daerah yang diperoleh maka semakin kecil pula tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan R. Neneng Rina Andriani, Nisa Noor Wahid (2018, menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 – 2015. Hal ini sama halnya Penelitian yang dilakukan oleh Reza Marizka (2013, bahwa hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah telah diterima. Pada hasil perhitungan statistika menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel diperoleh nilai $t_{\text{statistik}} = 1,253486$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ persen (%), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,9200. Nilai Absolut $t_{\text{statistik}} < t_{\text{tabel}}$ ($1,253486 < 2,9200$), berarti H_1 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Wulandari dan Kartika (2021), Rizqiyah (2013), dan Asriyawati (2014) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Suwendra dan Fridayana Yudiatmaja (2014), Filomena Lumur dan Putu Diah Asrida (2020), Siska Willy (2020), dan Rochana dan Mardianto (2020) yang menemukan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah telah diterima. Pada hasil perhitungan statistika menunjukkan bahwa variabel Pajak Restoran diperoleh nilai $t_{\text{statistik}} = 3.716212$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ persen (%), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,9200. Nilai Absolut $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$ ($3.716212 > 2,9200$), berarti H_2 diterima. Menunjukkan bahwa Variabel Pajak Restoran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suartini dan Utaa (2012), Rizqiyah (2013), Asriyawati (2014), serta Fikri dan Mardani (2017), yang menyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Karena semakin banyak restoran yang dibangun maka semakin besar bisnis restoran yang berkembang. Dengan demikian pajak restoran terhadap pendapatan daerah juga meningkat.

Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan pajak Reklame berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah telah diterima. Pada hasil perhitungan statistika menunjukkan bahwa variabel Pajak Reklame diperoleh nilai $t_{\text{statistik}} = 1.588463$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ persen (%), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,9200. Nilai Absolut $t_{\text{statistik}} < t_{\text{tabel}}$ ($1.588463 < 2,9200$), berarti H_3 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel Pajak Reklame secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Somantri (2022) Dimana hasil penelitian menunjukan bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya pajak reklame belum memberikan pengaruh yang nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iis Anisa Yulia (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak reklame jika dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak daerah. Namun persentase kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli daerah masih tergolong rendah. Hal tersebut karena belum maksimalnya pemungutan pajak sehingga belum memberikan hasil yang signifikan juga disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menaati pajak.

Pengaruh Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pendapantan Asli Daerah

Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan PBB_P2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah telah diterima. Pada hasil perhitungan statistika menunjukkan bahwa variabel PBB_P2 diperoleh nilai $t_{\text{statistik}} = -3.067596$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ %, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,9200. Nilai Absolut $t_{\text{statistik}} < t_{\text{tabel}}$ ($-3.067596 < 2,9200$), berarti H_4 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel PBB_P2 secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendri Saputra (2022), bahwa Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

Pekanbaru tahun 2016-2020. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aswandi (2020), yang mendapatkan hasil bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare. Hasil yang sama juga diperoleh Setiawati (2021), yang mendapatkan hasil bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rossela Nur Dukalang (2020) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo.

Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapantan Asli Daerah

Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan BPHTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah telah diterima. Pada hasil perhitungan statistika menunjukkan bahwa variabel BPHTB diperoleh nilai $t_{\text{statistik}} = -0.447761$. Pada tingkat signifikan $\alpha = 0,05 \%$, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,9200. Nilai Absolut $t_{\text{statistik}} < t_{\text{tabel}}$ ($-0.447761 < 2,9200$), berarti H_0 ditolak. Menunjukkan bahwa Variabel BPHTB secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hal tersebut dipengaruhi adanya wajib pajak yang memanipulasi pembayaran pajak untuk menghindari tarif pajak yang tinggi atau masih adanya wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak tersebut. Kemudian juga bisa disebabkan kurangnya pembangunan property dan kurangnya minat masyarakat untuk memiliki aset berupa tanah dan bangunan yang tentunya akan berdampak bagi besarnya BPHTB yang sejalan dengan meningkatnya penerimaan PAD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal (2020), bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. Lain halnya penelitian ini yang dilakukan oleh Meliyana dan Efendi bahwa BPHTB berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Batam. Hal ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Alfatarisya (2022), bahwa hasil penelitian ini menunjukkan variabel BPHTB berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Tangerang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah;
2. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB_P2, BPHTB secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB_P2, BPHTB dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.
4. Secara parsial, Pajak Hotel, Pajak Reklame, PBB-P2 dan BPHTB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Secara parsial, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak reklame, PBB-P2 dan BPHTB tidak berpengaruh positif terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

Saran

1. Bagi Pemerintah hendaknya lebih baik lagi dengan intensifikasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kepatuhan membayar pajak, sentralisasi program aplikasi perpajakan, dan peningkatan koordinasi terkait efisiensi administrasi. Selanjutnya ekstensifikasi melalui penambahan wajib pajak baru seperti pendataan potensi

masyarakat khususnya para pelaku usaha yang usahanya menjadi objek pajak daerah, untuk itu dilakukan pengawasan dan pembinaan sampai dapat menjadi wajib pajak.

2. Bagi masyarakat sebagai wajib pajak agar meningkatkan kesadaran dalam menjalankan hak dan kewajiban pajak agar penerimaannya semakin meningkat. Sehingga dari penerimaan tersebut digunakan untuk kemandirian daerah dan kesejahteraan bersama.
3. Bagi peneliti selanjutnya perlu menambah atau mengganti variabel-variabel bebas pada penelitian ini dengan variabel-variabel lain yang memungkinkan relevan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Fiskal Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, R. F., dan Husna, N. (2021).** Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018-2020. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 9(03), 241.
- Baharuddin, D. (2022).** Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah Kota Makassar. *Economics and Digital Business Review*, 3(2), 131–145.
- Bella, S., Sari, F., dan Aswin, U. R. (2022).** Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformstion*, 3(5).
- Biringkanae, A., dan Tammu, R. G. (2021).** Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Public Administration Journal*, 4(1), 19–25.
- Bukit, P. (2022).** Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 325–334.
- Christia, A. M., dan Ispriyarso, B. (2019).** Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Dick-Sagoe, C. (2020).** Decentralization for Improving the Provision of Public Services in Developing Countries: A Critical Review. *Cogent Economics and Finance*, 8(1).
- Ghozali, I. H. (2018).** *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (Sembilan). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, A. M., Hamzah, M. Z., dan Sofilda, E. (2019).** Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 105–127.
- Hardiana, R. D., Tanuatmodjo, H., dan Kurniati, F. (2020).** Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 (Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjelang Dua Dekade Otonomi Daerah di Indonesia). *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 197–210.
- Iqbal, M., dan Sunardika, W. (2018).** Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009 – 2015). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 10–35.
- Jejen, L. (2022).** Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Politeknik Baubau*, 1(1), 36–42.
- Kasih, M. W. R., dan Sulistyowati, E. (2022).** Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11869–11876.
- Kustianingsih, N., Muslimin, dan Kahar, A. (2018).** Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6), 82–91.
- Lestari, A., Dali, N., dan Abdullah, M. (2016).** Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal*

Progres Ekonomi Pembangunan, 1(2), 44–55.

- Mbipi, S. D., Assih, P., dan Sumtaky, M. (2020).** Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(2), 152–158.
- Mulyana, A., dan Budianingsih, R. (2019).** Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1), 1371–1382.
- Musfirati, A., dan Sugiyanto, H. (2021).** Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20–36.
- Orocomna, M., Bharanti, B. E., dan Layuk, P. K. A. (2017).** Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015. *Jurnal Kedua*, 2(3).
- Pamungkas, S. (2018).** Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 46–56.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.07/2020 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A.
- Prasetyo, A., dan Rahayu, D. (2019).** Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Fiscal Stress Terhadap Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(4), 872–881.
- Rahman, F. A. (2017).** Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Dikota Makasar. *Jurnal Economix*, 5(2), 104–115.
- Ramadhan, P. R. (2019).** Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 81–87.
- Rante, A., Mire, M. S., dan Paminto, A. (2017).** Analisis Kemandirian Keuangan Daerah. *INOVASI*, 13(2), 78–89.
- Samosir, M. S. (2020).** Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Journal of Public Administration and Government*, 2(1), 35–43.
- Sauyai, A., Rotinsulu, D. C., dan Tolosang, K. D. (2022).** Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong Tahun 2014-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(1), 131–143.
- Sihombing, H., dan Tambunan, B. H. (2020).** Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Economics and Business*, 01(02), 65–75.
- Siregar, S. (2019).** *Statistik Parameter Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17* (F. Hutari (Ed.); Satu). Bumi Askara.
- Sumardjoko, I. (2019).** Penguatan Kinerja Keuangan Daerah Wilayah Kepulauan dan Implikasinya Terhadap Perubahan Fundamental Ekonomi Regional. *Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 5(5), 1–23.
- Taras, T., dan Artini, L. G. S. (2017).** Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(5), 2360–2387.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Widodo, I. (2017). Dana Desa dan Demokrasi Dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 65–85.

